



Penguatan Nilai-Nilai Antikorupsi Berbasis Pendekatan Aksiologis kepada Peserta Didik SMA

Fahdian Rahmandani¹, Trisakti Handayani², Moh. Wahyu Kurniawan², Samsuri³

¹Teacher Professional Education Study Program, University of Muhammadiyah Malang, Indonesia

²Civic Education and Pancasila Program Study, University of Muhammadiyah Malang, Indonesia

³Civic Education and Law Program Study, Law and Political Sciences, Yogyakarta State University, Indonesia

fahdianrahmandani@umm.ac.id

ABSTRACT

Keywords:

Character;
Anticorruption Values;
Axiological Approach;
Curricular;
Extracurricular;
Learners.

Abstract: This research aims to assess the distribution of character integrity through an axiological approach, and determine the character integrity of high school level students. This research uses an unbalanced combination research method (concurrent embed) with a qualitative approach as the primary method and a quantitative approach as the secondary method. The qualitative approach is conducted using a case study method focused on corruption, while the quantitative approach is used to measure students' integrity scores. This research was conducted at SMAN 1 Sleman, SMAN 2 Bantul, and SMAN 6 Yogyakarta. The subjects of this research include the Deputy Principal for Student Affairs, Deputy Principal for Curriculum, Civics Teachers, and students. The sample in this study was 375 students. Qualitative data collection techniques use observation, interviews and documentation. Quantitative data collection techniques use questionnaires. The research results show that: (1) Strengthening the integrity character of students through an axiological approach carried out curricularly and extracurricularly. Curricularly this is done through Civics subjects and extracurricularly it is done through extracurricular activities by getting students accustomed to practicing the values of integrity in every activity. (2) Students have a character of integrity that is classified as very good. Student integrity score/value $\geq .1SBx$. From this research, the axiological approach in strengthening anti-corruption values has a significant contribution to achieving a high level of integrity among students, equipping them with a strong understanding of integrity to prevent corruption in the future. Moving forward, this anti-corruption education model can not only be applied in DIY but is also expected to be adaptable in other regions with local context adjustments.

Kata Kunci:

Karakter;
Nilai Antikorupsi;
Pendekatan Aksiologis;
Kurikuler;
Ekstrakurikuler;
Peserta Didik.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menilai penguatan karakter integritas melalui pendekatan aksiologi, dan mengetahui karakter integritas peserta didik tingkat SMA. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi tidak berimbang (concurrent embed) yaitu pendekatan kualitatif sebagai metode primer dan pendekatan kuantitatif sebagai metode sekunder. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan metode studi kasus yaitu korupsi, sementara pendekatan kuantitatif dilakukan untuk mengukur skor/nilai integritas siswa. Penelitian ini dilakukan di SMAN 1 Sleman, SMAN 2 Bantul, dan SMAN 6 Yogyakarta. Subjek penelitian ini meliputi Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan, Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum, Guru PPKn, dan siswa. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 375 siswa. Teknik pengumpulan data kualitatif menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data kuantitatif menggunakan angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penguatan karakter integritas peserta didik melalui pendekatan aksiologi dilakukan secara kurikuler dan ekstrakurikuler. Secara kurikuler dilakukan melalui mata pelajaran PPKn dan secara ekstrakurikuler dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler dengan membiasakan peserta didik untuk mengamalkan nilai-nilai integritas pada setiap aktivitasnya. (2) Peserta didik memiliki karakter integritas yang tergolong sangat baik. Skor/nilai integritas siswa $\geq .1SBx$. Dari penelitian ini, pendekatan aksiologis dalam penguatan nilai-nilai antikorupsi memiliki kontribusi signifikan terhadap pencapaian tingkat integritas yang tinggi di kalangan siswa di mana siswa dibekali pemahaman yang kuat tentang integritas untuk mencegah tindakan korupsi di masa depan. Ke depan, model pendidikan antikorupsi ini tidak hanya dapat diterapkan di DIY, tetapi diharapkan juga di daerah lain dengan penyesuaian konteks lokal masing-masing.

Article History:

Received : 08-08-2024
Revised : 30-10-2024
Accepted : 15-11-2024
Online : 01-12-2024



<https://doi.org/10.31764/pendekar.v7i4.26012>



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



A. LATAR BELAKANG

Beberapa tahun terakhir, persoalan moral menjadi *trending topic* di berbagai kalangan mulai dari tingkat pelajar hingga tatanan masyarakat umum. Persoalan moral muncul dalam berbagai bentuk, ukuran, dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Begitu juga dengan tindakan korupsi, merupakan fenomena sosial yang menyebabkan sebuah permasalahan kronis dan krusial. Tindakan korupsi akan menggerogoti akuntabilitas diri seseorang dan pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada publik. Korupsi merupakan tindakan jijik yang menjadi ancaman terhadap pembangunan berkelanjutan (Quah, 2017); (Hakeem Ishola, 2012). Sulit untuk menjelaskan korupsi secara utuh, karena korupsi merupakan masalah yang kuno dan memiliki fleksibilitas di berbagai sektor sehingga penjelasan tentang korupsi hanya tertuju pada penyimpangan perilaku negatif. Sebenarnya alasan terjadinya korupsi dapat ditinjau dari beberapa faktor. Audretsch (2018) menjelaskan secara singkat alasan dibalik tindakan korupsi disebabkan karena sistem demokrasi yang digunakan di beberapa negara masih banyak celah sehingga lembaga-lembaga politik dapat dimasuki oleh para politisi yang korup. Faktor lain penyebab terjadinya korupsi coba dipaparkan oleh KPK berdasarkan studi yang telah dilakukan kepada pelaku korupsi, mahasiswa, dan ASN. Penyebab korupsi dalam sudut pandang KPK penting untuk disorot adalah faktor internal individu, karena lemahnya moral dan etika dalam diri seseorang, gaya hidup mewah, persepsi tentang korupsi yang terbatas, permisif; dan faktor budaya permisif, mendahulukan kepentingan golongan (solidaritas buta) (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018).

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam memberantas korupsi, seperti pembuatan membuat berbagai peraturan perundang-undangan, pembentukan komisi *ad-hoc* seperti KPK, yang ditindaklanjuti dengan penegakan hukum yang tegas Selain pendekatan struktural yang sudah dilakukan, dalam memberantas korupsi sebaiknya dilakukan dengan cara lain yakni dengan semangat dan atmosfer antikorupsi melalui pendekatan kultural atau pendidikan formal di sekolah. Pendekatan kultural ditujukan pada sebuah usaha untuk membangun kesadaran publik dalam memperkuat sikap antikorupsi. Dalam hal ini sekolah sebagai lembaga pendidikan formal dapat menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada siswa (Murdiono, 2016). Memberantas korupsi sudah menjadi tanggung jawab bersama dan perlu dilakukan melalui berbagai cara untuk mengampanyekan nilai-nilai antikorupsi di lingkungan sekolah secara terus-menerus. Salah satunya dengan mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum sekolah. Bentuk pengintegrasian tersebut tentunya menjadi solusi karena kurikulum merupakan peta yang mengantarkan siswa menuju harapan yang ideal, ada bentuk program-program yang menyangkut lingkungan sekolah, suasana kelas, pola interaksi guru dengan siswa dalam kelas, bahkan pada kebijakan serta manajemen pengelolaan sekolah dalam hubungan interaksi vertikal dan horizontal (Rosyada, 2013)

Penelitian berikut menjelaskan bahwa pendidikan antikorupsi merupakan instrumen dalam menanamkan nilai-nilai kepada siswa. Penelitian yang dilakukan oleh Murdiono (2016) menjelaskan bahwa sebaiknya dalam menanggulangi tindakan korupsi harus menggunakan pendekatan yang komprehensif, strategis dan masif secara kultural. Bagi Murdiono (2016) sekolah merupakan lembaga kultural yang mempunyai peran dalam melakukan pendidikan antikorupsi. Selain itu sekolah sebagai lembaga pendidikan formal juga berperan penting untuk memperkuat gerakan antikorupsi, terutama melalui mata pelajaran PPKn. Sekolah dapat memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai dan perilaku anak-anak. Karena menanamkan nilai pada anak-anak adalah salah satu pilar pendidikan. Pendidik sebagai navigator memainkan peran kunci dalam *proses transfer of value*.

Berbeda dengan model pendidikan antikorupsi yang dilakukan oleh Murdiono (2016) penelitian lain yang dilakukan Gurning et al. (2014) memberikan mode pendidikan antikorupsi dengan melaksanakan warung kejujuran sebagai implementasinya. Manfaat dengan dilaksanakannya warung kejujuran tersebut sebagai tolak ukur keberhasilan pembelajaran antikorupsi yang diaktualisasikan

melalui warung kejujuran dengan membiasakan para siswa untuk berperilaku jujur. Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan antikorupsi masih bersifat parsial atau terpisah. Dalam implementasi pendidikan antikorupsi ada yang melakukannya dengan pengintegrasian dengan mata pelajaran lain seperti PPKn dan dilakukan melalui kegiatan intra sekolah semacam kantin kejujuran dan kebijakan sekolah. Dalam pandangan peneliti, pelaksanaan pendidikan antikorupsi sebaiknya berkesinambungan dan komprehensif, dengan memperhatikan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas sehingga tujuan akhir dari pendidikan antikorupsi untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada siswa dapat tercapai.

Sebuah konsep tindakan dalam memerangi kejahatan korupsi di gagas oleh Gong & Wang (2013) dengan zero tolerance for corruption. Toleransi terhadap korupsi dapat dilihat dari bagaimana orang memahami aturan dan etika sosial dan bagaimana setiap orang bereaksi terhadap perilaku menyimpang. Secara khusus, apa yang disebut sebagai zero tolerance mengacu pada kecenderungan untuk menolak godaan terlibat dalam tindakan korupsi dalam perilaku sendiri dan juga mempertimbangkan perilaku korup orang lain sebagai etika yang tidak dapat diterima. Tanpa toleransi memiliki sifat yang dapat diukur, yang mencakup tidak menunjukkan simpati terhadap korupsi; bersedia melaporkan contoh-contoh korupsi yang menjadi perhatian seseorang; mendukung penegakan hukum yang ketat; dan bersikap keras bahkan untuk pelanggaran kecil.

Siswa sebagai generasi penerus bangsa diharapkan mampu menjadi agen perubahan untuk memperbaiki segala persoalan yang tengah dihadapi bangsa ini. Bagi Biesta et al. (2009) siswa yang merupakan warga negara muda dapat menjadi investasi sebuah bangsa dengan turut merefleksikan peran mereka melalui praktik sosial dan budaya sebelum bertindak sebagai warga negara seutuhnya. Warga negara yang berintegritas merupakan cermin dari warga yang memiliki sikap antikorupsi. Ekspresi integritas dalam diri individu secara langsung berlawanan dengan perilaku korupsi. Tindakan yang berintegritas akan mempromosikan nilai partikular (mengutamakan kepentingan umum), tidak hanya sebatas mencegah tetapi juga menangkal korupsi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Sukadari et al. (2018) menyebutkan jika akar-akar korupsi salah satu penyebabnya karena rendahnya integritas diri seseorang. Oleh karena itu, pengintegrasian nilai antikorupsi penting untuk dilakukan secara bersamaan dengan penanaman nilai integritas kepada siswa.

Pentingnya karakter integritas pada diri setiap siswa bukan tanpa alasan. Pada tahun 2045 Indonesia akan mengalami momentum paling penting dalam sepanjang sejarah. Tepat 100 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia akan merasakan masa produktif atau bonus demografi (Abi, 2017). Bonus demografi yang dialami Indonesia tidak lepas dari beban ketergantungan atau dukungan ekonomi yang diberikan oleh penduduk usia produktif kepada usia dibawah 15 tahun dan diatas 16 tahun lebih ringan. Bonus demografi tertinggi didapatkan ketiga suatu negara mendapatkan angka ketergantungan rentang antara 40-50% (yang berarti orang 100 produktif menanggung orang usia tidak produktif sekitar 40-50. Data BPS hasil sensus tahun 2010 menyebutkan angka rasio ketergantungan bangsa Indonesia sebesar 51,3%. Data tersebut menunjukkan bahwa bonus demografi yang didapatkan bangsa Indonesia sudah terjadi sejak tahun 2010, dan puncaknya sekitar tahun 2020 hingga tahun 2045 (Noor, 2016); (Badan Pusat Statistik, 2010).

Dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi, Anas (2018) berpendapat, jika pendidikan antikorupsi dapat di insersesi (integrasi) melalui mata pelajaran PPKn. Pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam pendidikan kewarganegaraan bisa menjadi sarana pendidikan karakter di sekolah dalam pengembangan karakter siswa. Guru PPKn dapat mengembangkan desain rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menyisipkan nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran yang relevan (Murdiono, 2016). Selaras dengan maksud insersi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn, Winataputra (2012) berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan yang bermuara pada gagasan *"The Ideal Citizenship"* sebagai *"Informed and Reasoned Decision Maker"* yang *"competent, confident, and committed"* harus terasah kompetensinya. Maksudnya pendidikan

kewarganegaraan atau di Indonesia disebut sebagai PPKn merupakan bentuk kurikuler sebagai pendidikan nilai yang dibutuhkan dalam membangun konsistensi penanaman nilai-nilai antikorupsi. Komalasari & Saripudin (2018) mempertegas bahwa pendidikan nilai dapat diintegrasikan dalam pendidikan kewarganegaraan, karena pendidikan kewarganegaraan memiliki visi pembangunan karakter bangsa. Selain itu, pendidikan antikorupsi yang diberikan kepada siswa lebih baik tidak berkutat pada pemberian wawasan di ranah kognitif, atau hanya sekadar pada pemahaman dan menghafal. Lebih dari itu pendidikan antikorupsi diharapkan menyentuh ranah afektif dan psikomotor sehingga pendidikan antikorupsi mampu memberikan efek dalam membentuk sikap dan perilaku antikorupsi siswa melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai antikorupsi. Penerapan pendidikan antikorupsi di sekolah diharapkan dapat menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan (Handoyo, 2009).

Pendidikan memiliki tugas imperatif tidak jauh dari implikasi terhadap individu dan sosial. Secara individual, pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan potensi manusia baik dalam aspek jasmani, rohani dan akal. Pendidikan yang baik akan mampu mengembangkan potensi manusia menuju kebaikan dan kesempurnaan (insan kamil) yaitu kuat dan sehat secara jasmani, cerdas otaknya dengan memiliki kualitas spiritual yang baik. Secara sosial, pendidikan sebagai proses pewarisan kebudayaan yang berupa nilai-nilai, perilaku dan teknologi dari generasi ke generasi dapat melahirkan generasi yang lebih kreatif dengan tetap mempertahankan nilai kearifan. Secara sosial maupun individual, korupsi ketika berada dalam lingkungan yang tidak jujur maka akan menghasilkan seseorang menjadi korup dan secara alami seseorang tersebut kurang merasa bersalah melakukan tindakan semacam itu. Tetapi jika korupsi dalam lingkungan yang jujur, sebuah tindakan yang korup akan menimbulkan perasaan yang bersalah dengan tingkat kemarahan yang lebih kuat. Karena kemarahan adalah pemicu untuk pengungkapan sebuah tindakan yang korup, dan jika tindakan korupsi terdeteksi kemungkinan besar akan dilaporkan (Hakeem Ishola, 2012).

Dasar pentingnya pendidikan antikorupsi salah satunya memaknai dari tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dalam pasal 3 dijelaskan bahwa "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab" (Republik Indonesia, 2003). Dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa tujuan pendidikan nasional tersebut secara tersirat yaitu untuk membentuk warga negara muda yang berintegritas dimana warga negara yang berintegritas memiliki tingkat perilaku korupsi yang rendah. Masalah korupsi yang mejadi penghambat pembangunan bangsa Indonesia dan beberapa daerah tentunya harus ditangani dengan baik. Lembaga pendidikan sebagai candradimuka tentunya memiliki andil dalam proses kematangan intelektual, emosional, dan spiritual siswa guna mewujudkan generasi emas yang besar tanpa tersandung perilaku antikorupsi. Tujuan dari penelitian ini diantaranya untuk mengetahui implementasi pendidikan antikorupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta, SMA Negeri 2 Bantul, dan SMA Negeri 1 Sleman secara kurikuler dan ekstrakurikuler dan untuk menganalisis integritas siswa sebagai wujud warga negara muda yang berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Alasan yang melatarbelakangi peneliti tertarik memilih sekolah yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, karena daerah ini terkenal sebagai kota pelajar. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta tentang solusi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara pendekatan kultural atau melalui pembudayaan kepada siswa di sekolah. Dalam penelitian ini, peneliti memilih beberapa sekolah pada jenjang SMA

di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dijadikan objek penelitian. Pemilihan objek penelitian dalam penelitian ini didasarkan pada lokasi sekolah yang berada di daerah kota/kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman dan berdasarkan nilai PPDB tahun 2019. Beberapa sekolah tersebut seperti SMA Negeri 6 Yogyakarta yang berada di Kota Yogyakarta, SMA Negeri 2 Bantul yang berada di Kabupaten Bantul, dan SMA Negeri 1 Sleman yang berada di Kabupaten Sleman.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kombinasi data penelitian (*mixed methods*). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model campuran tidak berimbang. Karena dalam penelitian ini pendekatan kualitatif sebagai metode primer dan pendekatan kuantitatif sebagai metode sekunder. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus karena ada kasus tunggal holistik dengan desain satu kasus dan menempatkan kasus tersebut sebagai fokus penelitian. Kasus dalam penelitian ini adalah korupsi sehingga dalam fokus penelitiannya berupa pencegahan dan pemberantasan kasus korupsi melalui pendekatan kultural yang dilakukan di sekolah. Selain itu metode kualitatif juga digunakan untuk mengetahui pengamalan nilai-nilai integritas oleh peserta didik. Sementara dalam mengukur skor/nilai integritas siswa yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengadopsi beberapa nilai dalam instrumen yang digunakan BPS dalam mengukur persepsi dan perilaku antikorupsi seperti suap, pengalihan dana publik, penggunaan jabatan untuk keuntungan pribadi, nepotisme dalam pelayanan sipil, dan penangkapan oleh negara.

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah SMA Negeri 6 Yogyakarta, SMA Negeri 2 Bantul, dan SMA Negeri 1 Sleman. Pemilihan objek penelitian ini berdasarkan lokasi sekolah di Kota/Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta dan berdasarkan hasil PPDB untuk menentukan populasi penelitian yang memiliki prestasi nilai merata. Pemilihan lokasi penelitian tersebut juga relevan dengan tujuan penelitian ini dikarenakan 3 sekolah tersebut mengimplementasikan materi nilai-nilai anti korupsi melalui program kurikuler yakni mata pelajaran PPKn. Sedangkan implementasi nilai-nilai anti korupsi juga dilakukan melalui program ekstrakurikuler. Sumber data dalam penelitian ini adalah guru dan siswa yang meliputi: (1) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum; (2) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan; (3) Guru PPKn; dan (4) Siswa-siswi IPA dan IPS kelas XI di masing-masing sekolah SMA Negeri 6 Yogyakarta, SMA Negeri 2 Bantul, dan SMA Negeri 1 Sleman. Selain itu, penelitian yang dilakukan terhadap siswa juga ditujukan untuk mengetahui skor/nilai integritas warga negara muda di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini berdasarkan tabel penentuan jumlah sampel Isaac dan Michael dari populasi tertentu dengan taraf kesalahan 10% dari populasi dimana untuk SMAN 1 Sleman adalah 119 siswa, SMAN 2 Bantul adalah 260 siswa, dan SMAN 6 Yogyakarta adalah 254 siswa.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan dengan pendekatan kuantitatif yaitu menggunakan angket. Jenis pertanyaan dalam angket yang diajukan adalah tertutup, maksudnya angket yang disusun untuk mendapatkan data tentang keadaan responden sendiri. Skala yang digunakan dalam angket penelitian ini adalah skala likert. Instrumen angket yang digunakan di uji coba/try out terlebih dahulu agar mengetahui tingkat kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*reliabilitas*). Dalam uji validitas penelitian ini, apabila r hitung lebih besar dari 0,361 maka butir/item tersebut dikatakan valid. Ada 15 butir/item pernyataan yang di uji validitas, dan dapat dikatakan valid sebanyak 15 butir/item. Dalam penelitian ini, hasil uji reliabilitas instrumen menunjukkan hasil yang reliabel yang ditunjukkan dengan hasil perolehan data yang memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas program yang dilakukan sekolah terhadap integritas peserta didik.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dan teknik analisis data kuantitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif

yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data, menyajikan data, dan penarikan kesimpulan. Demi mendapat data yang absah maka dalam proses analisis data diatas dilakukan proses telaah data. Proses telaah dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Sedangkan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu dengan menggunakan bantuan program Microsoft Excel dan Statistik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Pendidikan Antikorupsi Berbasis Aksiologis

Pemberantasan korupsi harus dilaksanakan secara konsisten dengan memberikan lebih pemahaman dan kesadaran yang dilakukan melalui sosialisasi. Sosialisasi dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga, perusahaan/instansi-instansi, masyarakat, dan khususnya sekolah agar tidak terjadi korupsi di masa yang akan datang (Gephart, 2016). Bentuk sosialisasi ini dapat dimunculkan melalui sistem pendidikan formal ataupun sekolah. Proses sosialisasi perlu diberikan kepada warga negara agar mereka memiliki kebajikan yang diperlukan untuk melindungi berbagai bentuk kebebasan. Kebajikan dalam diri warga negara harus dikembangkan serta ditanamkan (Peterson, 2011).

Sekolah sebagai pelaksana pendidikan sebaiknya menjalankan proses perubahan sikap dan mental yang terjadi pada diri seseorang elalui jalur yang lebih sistematis yakni proses pembudayaan. Perihal pendidikan antikorupsi, sekolah memiliki cara dalam membentuk nuansa dan atmosfer yang mendukung upaya untuk menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi (Harmanto, 2014). Meski (Transparency International, 2004) menyebutkan jika perubahan dalam sikap dan perilaku masyarakat tidak akan segera terjadi dan dampak pendidikan antikorupsi hanya akan terasa dalam jangka panjang. Karena pada dasarnya Korupsi berkaitan dengan moral. Korupsi merupakan salah satu tindakan immorality, sehingga perlu ditangani secara inklusif dan berkelanjutan (Miller, 2016). Namun adanya makna antikorupsi yang dilatih akan membuat orang lebih jujur, dan meningkatkan kesadaran warga ke tingkat yang lebih baru. Level baru yang dimaksud di sini yaitu dengan bangkitnya integritas tanpa kompromi dalam diri seorang individu. Integritas tanpa kompromi dapat ditunjukkan dengan tetap setia pada apa yang diyakini, seperti menjunjung kejujuran, keadilan, dan "melakukan hal yang benar" tanpa kompromi, bahkan ketika dalam keadaan yang membuatnya sulit (Basabose, 2019).

Pendidikan antikorupsi yang berfokus pada penanaman nilai-nilai, akan menguatkan nilai-nilai antikorupsi yang di internalisasi pada diri warga negara muda sebagai pedoman hidup agar tidak melakukan tindakan korupsi. Pendidikan antikorupsi sebaiknya tidak sekedar mengondisikan para siswa untuk tahu, lebih dari itu pembelajaran antikorupsi harus mengutamakan hasil belajar yang bermakna dengan mengalami Siswa diberikan kesempatan untuk membuat keputusan dan pilihan untuk dirinya sendiri (Gurning et al., 2014). Dengan demikian pendidikan antikorupsi merupakan usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan generasi antikorupsi melalui proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi. Dalam implementasi pendidikan antikorupsi, (Manurung, 2012) menawarkan desain yang dapat digunakan untuk para pendidik. Ada tiga bentuk desain kurikulum pendidikan korupsi, yaitu: kurikulum formal, kurikulum operasional, dan kurikulum yang tersirat.

2. Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Program Kurikuler (PPKn)

Sekolah dipandang sebagai wahana yang tepat dalam melaksanakan pendidikan kewarganegaraan dengan skala yang lebih luas. Melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat memberikan dampak dengan menjangkau isu-isu sosial diluar gerbang sekolah (McMurray & Niens, 2012). Salah satu isu yang penting untuk dijangkau oleh siswa saat ini yaitu korupsi. Karena masalah korupsi masih menjadi persoalan primer baik dalam lingkup nasional maupun global. Oleh

karena itu, penting untuk memberikan pendidikan kewarganegaraan berbasis pendidikan antikorupsi kepada siswa. Dalam memprogramkan pendidikan antikorupsi yang diberikan kepada siswa, dapat melalui program intrakurikuler/mata pelajaran (Manurung, 2012). (Tamba, 2017) menambahkan jika pendidikan antikorupsi secara konsep merupakan upaya melalui jalur pendidikan untuk mengendalikan serta mengembangkan sikap antikorupsi. Hal ini memiliki relevansi dengan pendidikan kewarganegaraan karena keduanya memfokuskan pada pembentukan sikap yang sesuai dengan sistem nilai yang diterima oleh masyarakat. Implementasi pendidikan antikorupsi dapat di insersi ke dalam pendidikan kewarganegaraan/PPKn. Proses insersi ini adalah bagian dari wujud pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Bentuk pendidikan antikorupsi yang diberikan melalui mata pelajaran PPKn, dapat dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan mengembangkan pendidikan antikorupsi melalui mata pelajaran PPKn dapat dimulai melalui penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Tidak adanya materi atau kompetensi dasar (KD) mengenai antikorupsi dalam kurikulum 2013 sehingga Bapak/Ibu Guru dalam merancang model pembelajaran berbasis pendidikan antikorupsi dengan menyisipkan materi antikorupsi pada kompetensi dasar (KD) yang relevan, dan menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi ke dalam setiap kegiatan belajar mengajar (KBM). Kompetensi Dasar (KD) yang relevan dengan materi antikorupsi seperti ancaman terhadap Integrasi Nasional. Jika dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya (Kurikulum KTSP), materi tentang antikorupsi sebenarnya masih menjadi materi pokok yang tercantum dalam kompetensi dasar yaitu menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia (BSNP, 2006).

Materi tentang antikorupsi yang tersirat tentunya membuat Bapak/Ibu Guru di SMAN 1 Sleman, SMAN 2 Bantul, dan SMAN 6 Yogyakarta untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan media. Selain menggunakan PPT atau LCD-Proyektor dalam pelaksanaan pembelajaran, Bapak/Ibu Guru mempersilahkan siswa menggunakan hp-nya untuk mencari materi ketika sedang menganalisis tentang tindakan pejabat yang korup. Materi antikorupsi yang dikembangkan diharapkan tidak hanya menyentuh ranah kognitif, saja, dan tidak sebagai pembelajaran yang menekankan pemahaman dan hafalan. Namun bagi Handoyo (2009) pendidikan antikorupsi harus menyentuh ranah afektif dan psikomotor sehingga dapat membentuk sikap dan perilaku antikorupsi siswa. Sehingga pendekatan pembelajaran yang digunakan berupa Saintifik dengan didukung model pembelajaran *discovery learning* dan *problem Based Learning (PBL)*, serta metode pembelajaran seperti tanya jawab, wawancara, diskusi, bermain peran, dan kuis.

Implementasi pendidikan antikorupsi melalui PPKn yang dilakukan di SMAN 1 Sleman, SMAN 2 Bantul, dan SMAN 6 Yogyakarta memiliki karakteristik masing-masing. Di SMAN 1 Sleman secara umum dilakukan dengan memperhatikan RPP, dimulai dengan memberikan motivasi kepada siswa untuk jujur, disiplin, tanggung jawab, berani, dan kerja keras. Di SMAN 2 Bantul dilakukan dengan tidak hanya terpaku pada muatan materi saja, tetapi juga pada nilai yang penting untuk ditanamkan kepada siswa, Penanamannya melalui pembiasaan-pembiasaan seperti membiasakan siswa untuk jujur ketika ulangan. Dalam hal ini siswa dibiasakan untuk berani melakukan ulangan tanpa ada pengawasan. Selain itu siswa harus dibiasakan untuk disiplin masuk kelas, mengumpulkan tugas. Sedangkan di SMAN 6 Yogyakarta dilakukan melalui model portofolio. Melalui model portofolio ini beberapa nilai antikorupsi dapat di internalisasi, seperti kejujuran, kedisiplinan, kerja keras, tanggung jawab, keberanian.

Dalam penanaman nilai-nilai antikorupsi yang orientasinya yaitu pada perkembangan moral siswa, guru memiliki peran secara filosofis. Guru memiliki peran dalam perkembangan moral siswa melalui "hidden curriculum" yang diwujudkan dalam lingkungan antarpribadi di sekolah dan di ruang kelas. Penanaman nilai-nilai antikorupsi secara hidden curriculum berarti dapat dilakukan melalui kurikulum pendidikan karakter tidak tertulis secara eksplisit, tetapi dapat di internalisasi

melalui aktivitas di dalam kelas seperti melalui pembiasaan-pembiasaan yang mereka lakukan di dalam kelas (Nucci et al., 2014). Berikut adalah bentuk pembiasaan yang dilakukan siswa dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada pembelajaran PPKn, seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pembudayaan Nilai-nilai Antikorupsi Pada Pembelajaran PPKn

| Nilai Antikorupsi | Pembudayaan Nilai Antikorupsi |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nilai Kejujuran | Membiasakan siswa untuk tidak mencontek, siswa diperintahkan untuk menemukan suatu konsep, teori melalui sumber yang tersedia dan secara jujur merangkum hasil presentasi dalam kertas serta melakukan refleksi dengan menyimpulkan materi yang telah dibahas |
| Nilai Kepedulian | Meminta siswa untuk memperhatikan kebersihan dan kerapian ruang kelas dan saling tukar informasi sehingga memperoleh pengetahuan baru dan menekankan pembelajaran berbasis lingkungan di setiap materinya |
| Nilai Kemandirian | Membiasakan siswa tidak bergantung kepada teman dalam mengerjakan tugas, seperti mengamati dan membaca materi, menyusun daftar pertanyaan yang belum dimengerti, dan merangkum hasil presentasi dalam kertas |
| Nilai Kedisiplinan | Memerintahkan siswa untuk tidak terlambat masuk kelas, memeriksa presensi kehadiran dan kesiapan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, serta rutin melakukan kegiatan literasi dengan mencari dan membaca berbagai referensi dari berbagai sumber guna menambah pengetahuan dan pemahaman tentang materi |
| Nilai Tanggungjawab | Membiasakan siswa untuk tidak lalai terhadap tugas yang diberikan dengan menyelesaikan tugas dan menyusun laporan hasil telaah tentang materi yang telah dipelajari dan menyajikan hasil analisis tentang materi |
| Nilai Kerja Keras | Membiasakan siswa untuk tidak menunda dalam menyelesaikan tugas secara tuntas, dengan mencari informasi lanjutan melalui membaca berbagai sumber lain yang relevan dari buku, internet, web, media sosial |
| Nilai Kesederhanaan | Melakukan refleksi manfaat proses pembelajaran yang telah dilaksanakan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan |
| Nilai Keberanian | Siswa secara bergantian diberikan kesempatan untuk mempresentasikan di depan kelompok lain tentang hasil analisis, pengamatan, dan diskusi, serta menanyakan hal-hal yang belum dimengerti |
| Nilai Keadilan | Membagi siswa menjadi beberapa kelompok secara merata dengan cara berhitung berurutan tanpa memilih-milih teman dalam kelompoknya |

Dalam pelaksanaan pembelajaran PPKn, agar pendidikan antikorupsi lebih bermakna maka dapat ditunjang dengan memberikan penguatan. Penguatan yang diberikan bisa berupa verbal maupun non-verbal (Asril, 2010). Penguatan secara verbal berupa dorongan yang membuat siswa merasa puas dan berbesar hati sehingga ia akan lebih terdorong untuk lebih aktif melakukan perilaku yang positif tersebut. Contohnya seperti memberikan teguran kepada siswa yang melakukan pelanggaran, mengingatkan mereka untuk jujur, disiplin, kerja keras, serta memberikan motivasi kepada mereka bahwa keberhasilan yang besar itu dimulai dari keberhasilan yang kecil. Sedangkan penguatan secara non-verbal bisa diberikan dengan melakukan pendekatan kepada siswa dengan memberikan sentuhan atau menyentuh pundak siswa agar tidak mengulangi perilaku yang melanggar peraturan, acungan jempol ketika siswa tepat dalam menjawab atau mengerjakan tugas sesuai perintah, atau dengan memberikan treatment hukuman kegiatan kepada mereka, seperti membersihkan kelas. Terpenting dalam penguatan implementasi pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran PPKn ini yaitu adanya teladan dari Bapak/Ibu Guru pengampu. Karena Guru dalam lingkup persekolahan secara tidak langsung juga mengemban tugas untuk mengajarkan siswa tentang kewarganegaraan. Seorang guru harus mampu memberikan edukasi terhadap siswa bagaimana hidup bernegara secara bajik (virtue) (Kissling, 2018).

Selanjutnya pada tahap evaluasi, dapat dilakukan dengan memberikan penilaian yang termuat dalam proses evaluasi terhadap implementasi pendidikan antikorupsi kepada siswa. Dalam evaluasi pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran PPKn dapat dilakukan pada akhir pembelajaran yaitu dengan memberikan arahan kepada siswa agar tidak melakukan tindakan korupsi meskipun dalam

bentuk sekecil apapun, dan tidak melakukan hal-hal lain yang sifatnya melanggar norma atau peraturan. Lebih jelas Manurung (2012) menyebutkan jika evaluasi pendidikan antikorupsi bersifat kuratif-negatif. Maksudnya pendidikan antikorupsi dapat dinilai dari kriteria berkurangnya perilaku buruk atau berkurangnya sikap tidak disiplin siswa yang terjadi dalam kegiatan sekolah. Misalnya kriteria tentang jumlah siswa yang tidak sering terlambat, tidak bolos, tidak mencontek, tidak terlibat tawuran, tidak terlibat kejahatan, dll. Semuanya dimulai dengan kata kunci "tidak". Atau dalam bahasa (Gong & Wang, 2013) yaitu kecenderungan untuk menolak godaan terlibat dalam tindakan korupsi baik dalam perilaku sendiri dan juga mempertimbangkan perilaku korup orang lain sebagai etika yang tidak dapat diterima.

3. Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler

Implementasi pendidikan antikorupsi yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan diluar pembelajaran, dapat dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan insidental. Model pendidikan antikorupsi seperti itu sebenarnya masih memiliki hubungan dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Menurut Wong et al. (2017) Pendidikan Kewarganegaraan tidak sebatas pada pendidikan yang ada di dalam kelas saja, lebih daripada itu pendidikan kewarganegaraan dapat dilakukan secara ekstrakurikuler dan tersirat di lingkungan sekolah. Belum adanya kebijakan khusus tentang program pendidikan antikorupsi sehingga dalam pelaksanaannya di integrasi ke dalam kegiatan ekstrakurikuler. Implementasi pendidikan antikorupsi dengan model ini lebih mengutamakan kegiatan yang menuntut kreativitas dan pemahaman siswa dalam penanaman dan pengolahan nilai-nilai antikorupsi. Keunggulan model ini siswa mendapatkan pengalaman-pengalaman konkrit tentang antikorupsi. Perencanaannya dilakukan setiap tahun secara implisit dengan melibatkan siswa dari berbagai ekstrakurikuler yang mereka ikuti. Bapak/Ibu Guru selalu mendampingi siswa mulai dari penyusunan program kerja sampai dengan pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaannya, siswa diharapkan berpartisipasi pada semua kegiatan yang dilakukan sekolah.

Penerapan pendidikan antikorupsi melalui kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dengan menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi pada setiap kegiatan ekstrakurikuler, yaitu dengan memberikan para siswa tanggung jawab di setiap kegiatan, seperti sebagai panitia pelaksana atau penanggung jawab kegiatan ekstrakurikuler. Atau siswa yang tergabung dalam ekstrakurikuler akan membentuk program kerja dan mendapatkan anggaran dalam melaksanakan program kerjanya. Siswa yang tergabung di masing-masing ekstrakurikuler harus bertanggung jawab dalam menjalankan program kerja serta mengolah dana sebaik mungkin. Selanjutnya siswa membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakan untuk program kerja kegiatan. Dari pemberian tanggung jawab semacam itu siswa akan terlatih untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Meskipun dalam implementasi pendidikan antikorupsi melalui kegiatan ekstrakurikuler memiliki kelemahan dengan tidak adanya struktur yang tetap dalam kerangka pendidikan dan pengajaran tentang antikorupsi. Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan ekstrakurikuler sangat efektif dalam membiasakan siswa untuk mengamalkan nilai-nilai antikorupsi. Aspek penting yang ditekankan dalam pembiasaan kepada siswa adalah penanaman nilai-nilai antikorupsi yang dilakukan melalui pembudayaan. Melalui proses pembudayaan akan menimbulkan suatu pembiasaan dalam perilaku-perilaku siswa sehingga menumbuhkan budaya antikorupsi di sekolah. Berikut contoh penanaman nilai-nilai antikorupsi yang dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pembudayaan Nilai-nilai Antikorupsi dalam Kegiatan Ekstrakurikuler

| Nilai Antikorupsi | Pembudayaan Nilai Antikorupsi |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nilai Kejujuran | Siswa diajarkan dan dibiasakan untuk berbicara, bertindak, dan mengolah dana secara jujur |
| Nilai Kepedulian | Siswa dibiasakan untuk peduli terhadap teman yang lain dengan saling tolong-menolong, dan peduli terhadap lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya serta membersihkan tempat yang kotor |
| Nilai Kemandirian | Siswa dibiasakan untuk mengerjakan tugas/instruksi dengan tidak bergantung orang lain |
| Nilai Kedisiplinan | Siswa dibiasakan untuk menghargai waktu dengan datang latihan tepat waktu, dan menyelesaikan tugas sesuai dengan target |
| Nilai Tanggungjawab | Siswa dibiasakan untuk tanggung jawab terhadap tugas yang diemban, dan menerima hukuman ketika instruksi yang dijalankan tidak sesuai perintah |
| Nilai Kerja Keras | Siswa dibiasakan untuk berlatih secara sungguh-sungguh dan menyelesaikan tugas sesuai instruksi |
| Nilai Kesederhanaan | Siswa dibiasakan untuk tidak berlebihan dalam berpakaian dan berperilaku |
| Nilai Keberanian | Siswa dibiasakan untuk berani menyampaikan pendapat di depan umum, dan berani dalam mengambil resiko |
| Nilai Keadilan | Siswa dibiasakan untuk tidak membeda-bedakan dalam berteman, dan adil dalam membagi tugas |

Proses pembudayaan nilai-nilai antikorupsi diatas pada akhirnya akan membentuk perilaku antikorupsi siswa. Melalui beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa, secara sistematis siswa akan dilatih dalam mengamalkan nilai-nilai antikorupsi. Khususnya dalam melatih kejujuran para siswa masing-masing sekolah menerapkan kantin kejujuran. Agar pembudayaan nilai-nilai antikorupsi diatas lebih bermakna bagi siswa, kiranya dilakukan dengan memberikan penguatan kepada para siswa. Penguatan yang diberikan kepada siswa dapat berupa penguatan verbal dan Penguatan non-verbal (Asril, 2010). Penguatan verbal diberikan dengan memberikan dorongan agar membuat siswa merasa puas dan berbesar hati sehingga siswa akan terdorong untuk lebih aktif melakukan perilaku yang positif. Bentuk penguatan verbal yang diberikan berupa motivasi untuk tidak melakukan pelanggaran dan memberikan gambaran tentang korupsi dengan menjelaskan bahwa awal mulanya korupsi itu dari yang kecil-kecil, seperti korupsi waktu, uang 10 ribu, 20 ribu, pelanggaran-pelanggaran kecil semacam ini jika tidak langsung diberi penjelasan maka akan menjadi kebiasaan.

Selanjutnya bentuk penguatan non-verbal terhadap penerapan pendidikan antikorupsi dapat dilakukan melalui mimik atau gestur tubuh, pemberian simbol atau benda, dengan memberikan sentuhan, melakukan pendekatan serta melalui kegiatan yang menyenangkan. Bentuk penguatan berupa mimik secara umum dilakukan dengan memberikan senyuman. Selanjutnya secara simbolik terhadap penguatan pendidikan antikorupsi dapat berupa ada simbol-simbol dan tulisan berupa pentingnya kejujuran, hindari korupsi yang ditempel di dinding-dinding sekolah di SMAN 1 Sleman. Sekolah memiliki karakteristik berupa etos, budaya, dan iklim yang dapat mempengaruhi pengembangan pengetahuan anak muda tentang kewarganegaraan, dan kecenderungan kompetensi mereka sebagai warga negara. Lebih jelasnya iklim sekolah sebagai lingkungan belajar yang demokratis dibangun melalui kontribusi guru terhadap etos demokratis di sekolah (Schulz et al., 2010). Dalam hal ini sekolah dan pendekatan guru kepada siswa menjadi faktor penting untuk diperhatikan dalam membangun iklim antikorupsi di lingkungan sekolah.

Sekolah sebagai organisasi yang memiliki struktur manajemen memiliki otoritas dalam membangun iklim antikorupsi di lingkungan sekolah. Iklim antikorupsi yang dibangun dapat dilakukan dengan memberikan contoh kepada siswa dalam mengelola sebuah organisasi, seperti mengajarkan siswa untuk menjunjung prinsip akuntabilitas dan transparansi (keterbukaan). Dalam prinsip akuntabilitas sekolah dapat melakukannya melalui pertanggungjawaban terhadap produk

kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan. SMAN 2 Bantul dalam mengajarkan siswa untuk menjunjung prinsip akuntabilitas, pada setiap akhir semester mengadakan forum dialog yang diikuti oleh Bapak/Ibu Guru bersama siswa. Bentuk kegiatan dalam forum dialog tersebut berupa evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler yang telah berlangsung selama satu semester. Pada saat itu masalah yang dibahas yaitu tentang batas maksimal berada di lingkungan sekolah yang dianggap sudah tidak relevan lagi karena siswa pada jam atau batas waktu tersebut masih berada di lingkungan sekolah untuk mempersiapkan lomba atau kegiatan sekolah. Selanjutnya dalam prinsip transparansi dapat dilakukan dengan mempublikasikan hasil penganggaran atau penggunaan dana BOS (bantuan operasional sekolah). Seperti yang dilakukan oleh SMAN 1 Sleman dalam memberikan informasi keuangan sekolah yang ditempel dalam papan pengumuman. Aspek penting selanjutnya yaitu pendekatan yang dilakukan oleh guru dalam memberikan penguatan pendidikan antikorupsi kepada siswa. Pendekatan ini berupa penyampaian perhatian kepada siswa yang bermasalah (melanggar peraturan) atau kegembiraan terhadap hasil pekerjaan mereka.

Selain itu bentuk penguatan pendidikan antikorupsi dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang secara langsung dapat berkenaan dengan siswa. Dalam penguatan ini masing-masing sekolah memiliki jenis kegiatan yang berbeda-beda. Di SMAN 1 Sleman dalam memberikan penguatan pendidikan antikorupsi melalui kegiatan dilakukan dengan mengundang pihak luar sekolah seperti mengundang kyai atau ustaz dalam memberikan ceramah kepada siswa tentang pentingnya hidup jujur, selain itu juga mengundang Kodim dalam rangka kegiatan penguatan karakter siswa agar disiplin, kerja keras, tanggung jawab, berani, selanjutnya ada kegiatan ke pesantren selama tiga hari menginap di sana dan ke yayasan yatim piatu dalam rangka bakti sosial. Dan di SMAN 2 Bantul kegiatan yang dilakukan dalam memberikan penguatan terhadap pendidikan antikorupsi yaitu melalui kegiatan-kegiatan yang bekerja sama dengan pihak luar sekolah, seperti bekerja sama dengan kapolsek, Lembaga masyarakat, pondok pesantren, panti asuhan, panti jompo dan pihak lainnya dengan tujuan sebagai upaya penguatan karakter siswa dengan mengembangkan pendidikan antikorupsi kepada siswa. Kegiatan-kegiatan semacam itu dapat dikategorikan sebagai bentuk penguatan non-verbal melalui kegiatan, tujuannya untuk memperkuat karakter siswa agar tidak terjebak dalam perilaku yang korup.

Bentuk penguatan pendidikan antikorupsi melalui kegiatan di SMAN 6 Yogyakarta dilakukan dengan kegiatan kewirausahaan, dalam kegiatan tersebut siswa akan berkenaan langsung dengan uang, lalu siswa dapat mengelola uang tersebut dan harus mempertanggungjawabkan. SMAN 6 Yogyakarta sebagai sekolah pelaksana program kewirausahaan tentunya sangat unggul dalam mengembangkan pendidikan antikorupsi melalui program kewirausahaan. Dalam pelaksanaannya siswa membuat olahan makanannya sendiri untuk dijual. Selanjutnya olahan makanannya dijual kepada teman-temannya dengan meletakkannya di sudut kelas. Siswa yang membeli bisa melatakan uang yang telah disediakan, dan mengambil kembalinya sendiri. Siswa juga dapat membuat wilayah perdagangan seperti bazaar untuk menjajakan dagangannya.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi pendidikan antikorupsi dalam penelitian ini memiliki dua model pendekatan, yaitu secara kurikuler dan ekstrakurikuler. Implementasi pendidikan antikorupsi secara kurikuler yaitu diberikan melalui mata pelajaran PPKn, dengan dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan mengembangkan pendidikan antikorupsi melalui mata pelajaran PPKn dapat dimulai melalui penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Dalam pelaksanaannya dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi dilakukan secara hidden curriculum atau melalui pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan siswa di dalam kelas. Sedangkan implementasi pendidikan antikorupsi yang diberikan melalui kegiatan ekstrakurikuler dalam pelaksanaannya sangat efektif dalam membiasakan siswa untuk mengamalkan nilai-nilai antikorupsi. Pendidikan antikorupsi yang diberikan kepada

siswa dapat berupa tanggung jawab di setiap kegiatan yang dilaksanakan, seperti sebagai panitia pelaksana atau penanggung jawab kegiatan ekstrakurikuler. Atau siswa yang tergabung dalam ekstrakurikuler akan membentuk program kerja dan mendapatkan anggaran dalam melaksanakan program kerjanya. Siswa membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakan untuk program kerja kegiatan. Pada tahap evaluasi, baik implementasi pendidikan antikorupsi yang dilakukan melalui kurikuler maupun ekstrakurikuler bersifat kuratif-negatif atau dinilai dari kriteria berkurangnya perilaku buruk atau berkurangnya sikap negatif. Semuanya dimulai dengan kata kunci "tidak".

4. Integritas Warga Negara Muda di DIY

Beberapa dekade ini kata integritas sering disebut-sebut. Terutama ketika banyak media memberikan kritik kepada para pejabat publik yang harus bekerja secara bersih dari tindakan korupsi. Kewaspadaan terhadap tindakan korupsi ini tentunya menempatkan integritas menjadi elemen penting untuk dibangun dalam diri warga negara. Integritas kini menjadi sebuah nilai tujuan yang harus di tumbuh kembangkan, khususnya kepada siswa sebagai warga negara muda penerus bangsa. Keseriusan Bangsa Indonesia dalam menumbuh kembangkan nilai integritas pada diri siswa ditunjukkan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Salah satu tujuan dalam Perpres tersebut yaitu ingin membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik. Dalam menyempurnakan tujuan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal dimana pada pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa nilai integritas menjadi salah satu nilai dasar yang ditanamkan kepada siswa.

Urgensi penanaman nilai integritas dilakukan agar siswa sebagai person mampu memerangi segala bentuk tindakan korupsi. Korupsi yang menggerogoti akuntabilitas diri seseorang menurut (Endro, 2017) penting untuk dilawan dengan meningkatkan integritas pada diri orang tersebut. Secara mendasar korupsi sebagai antonim dari integritas dapat merusak atau memperkecil kemungkinan terwujudnya kebaikan umum, seperti pada sektor pendidikan, korupsi seperti penghambat dari pembentukan/pembangkitan generasi, pada seorang manusia korupsi mengacu pada sesuatu yang berhenti untuk menjadi, atau kemerosotan pada kecenderungan manusia berperilaku dari yang semestinya. Integritas merupakan keutamaan/kebajikan yang mendorong individu untuk melakukan upaya partisipatif dalam mewujudkan kehidupan bersama yang baik. Integritas akan menimbulkan daya dorong untuk mengarahkan berfungsinya partikularitas dalam diri individu demi kebaikan umum yang sebanyak mungkin manusia bisa ikut merasakan. Pada kasus manusia atau institusi yang dikendalikan manusia, integritas merupakan suatu karakter baik manusia atau budaya baik organisasi yang menimbulkan daya dorong untuk mewujudkan keputusan dan tindakan bagi kebaikan bersama.

Siswa sebagai warga negara muda tentunya menjadi sebuah investasi bangsa dengan turut merefleksikan peran mereka melalui praktik sosial dan budaya sebelum bertindak sebagai warga negara seutuhnya (Biesta et al., 2009). Melalui beberapa bentuk pendidikan antikorupsi baik secara kurikuler maupun ekstrakurikuler yang diterima siswa di lingkungan sekolah secara langsung akan membantu siswa untuk merefleksikan peran mereka sebagai warga negara muda yang berintegritas. Beberapa tindakan yang dapat direfleksikan oleh siswa seperti tindakan yang dilakukan atas dasar pengetahuan dan pemahamannya, tindakan bersumber dari hati nuraninya, tindakan berdasarkan moral dan batinnya, tindakan berdasarkan rasa empati (perhatian) kepada orang lain, tindakan tanpa rasa pura-pura, dalam menyelesaikan masalah didasarkan pada norma atau hukum yang berlaku, dan bertanggungjawab terhadap segala tindakan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari integritas siswa sebesar 46,93 atau berada pada interval $X \geq 45$ yang berarti bahwa tingkat integritas siswa di DIY tergolong sangat baik. Selain itu, dari hasil analisis data ini dapat diketahui bahwa berdasarkan asal sekolah, jurusan, dan jenis kelamin siswa memiliki kriteria perilaku antikorupsi yang berbeda-beda. Berdasarkan asal sekolah siswa, sebanyak 112 siswa di SMAN 1 Sleman diketahui bahwa nilai rata-rata dari integritas siswa sebesar 46,39 atau berada pada interval $X \geq 45$ yang berarti bahwa tingkat perilaku antikorupsi siswa di SMAN 1 Sleman tergolong sangat baik. Selanjutnya sebanyak 133 siswa di SMAN 2 Bantul diketahui bahwa nilai rata-rata dari perilaku antikorupsi siswa sebesar 47,21 atau berada pada interval $X \geq 45$ yang berarti bahwa tingkat perilaku antikorupsi siswa di SMAN 2 Bantul tergolong sangat baik. Dan sebanyak 130 siswa di SMAN 6 Yogyakarta diketahui bahwa nilai rata-rata dari perilaku antikorupsi siswa sebesar 47,12 atau berada pada interval $X \geq 45$ yang berarti bahwa tingkat perilaku antikorupsi siswa di SMAN 6 Yogyakarta tergolong sangat baik.

Berdasarkan jurusannya, sebanyak 256 siswa jurusan IPA diketahui bahwa nilai rata-rata dari perilaku antikorupsi siswa sebesar 46,93 atau berada pada interval $X \geq 45$ yang berarti bahwa tingkat perilaku antikorupsi siswa berjenis kelamin laki-laki tergolong sangat baik. Sedangkan sebanyak 119 siswa jurusan IPS diketahui bahwa nilai rata-rata dari perilaku antikorupsi siswa sebesar 47,01 atau berada pada interval $X \geq 45$ yang berarti bahwa tingkat perilaku antikorupsi siswa berjenis kelamin laki-laki tergolong sangat baik. Berdasarkan jenis kelamin siswa, sebanyak 137 siswa berjenis kelamin laki-laki diketahui bahwa nilai rata-rata dari perilaku antikorupsi siswa sebesar 46,93 atau berada pada interval $X \geq 45$ yang berarti bahwa tingkat perilaku antikorupsi siswa berjenis kelamin laki-laki tergolong sangat baik. Sedangkan sebanyak 238 siswa berjenis kelamin perempuan diketahui bahwa nilai rata-rata dari perilaku antikorupsi siswa sebesar 46,94 atau berada pada interval $X \geq 45$ yang berarti bahwa tingkat perilaku antikorupsi siswa berjenis kelamin perempuan tergolong sangat baik.

Dalam menjelaskan integritas secara kompleks maka ada beberapa karakteristik yang penting untuk dipahami. Beberapa karakteristik tersebut secara konsisten dapat menunjukkan seorang memiliki integritas yang baik. Dengan mengadopsi penjelasan (Gostick & Telford, 2003) beberapa karakteristik tersebut meliputi sadar akan hal kecil, menemukan yang benar, bertanggung jawab, membudayakan kepercayaan, menepati janji, peduli pada kebaikan yang lebih besar, jujur dan rendah hati, bertindak bagaikan diawasi; dan konsisten. Kesembilan karakteristik tersebut merupakan nilai yang penting untuk dikembangkan serta ditanamkan kepada diri anak sejak dini. Karena nilai-nilai yang ditanamkan sejak dini akan menciptakan konsistensi sikap mental anak dalam menjalankan kehidupannya.

Gea (2014) menyebutkan jika integritas merupakan sesuatu yang terkait langsung dengan diri individu. Integritas diri berkaitan dengan sikap selalu mengedepankan tanggung jawab, kepercayaan, dan kesetiaan terhadap janji. Orang yang berintegritas adalah seseorang yang dapat diandalkan dan dapat diprediksi perkataannya, maksudnya apa yang dia kehendaki dan lakukan seperti apa yang dia katakan, terlebih makna ucapan dan tindakannya sangat logis, masuk akal, dan tertata rapi tidak menyimpan kejutan yang buruk (Šamánková et al., 2018). Dalam mengekspresikan integritas dalam diri, ada standar hak moral yang harus terpenuhi. Standar-standar ini mungkin tidak selalu tampak, tetapi seseorang dapat memperoleh akses kepada mereka melalui refleksi dengan ketulusan, kesungguhan, dan komitmen. Seorang yang memiliki integritas dapat dijelaskan ketika mereka mengembangkan rasa benar dan salah, mengamati tindakan, dan mengakui, dengan tetap setia kepada prinsip meskipun lingkungan tidak menghargai perilaku tersebut ((Mintrop, 2012). Integritas dapat dijelaskan secara mendalam sebagai rasa moral atau kecukupan adaptif dalam menghadapi kekuatan lingkungan yang mengancam harga diri individu, yang berupa penilaian negatif, sanksi, dan sejenisnya. Integritas pribadi menjadi jantung dari terbentuknya integritas publik dalam masyarakat yang dibentuk secara bebas. Dalam kasus memerangi korupsi, integritas merupakan identitas kebajikan yang harus diutamakan. Pribadi berintegritas akan mengutamakan sebuah

kebijakan dengan mendorong untuk mengelola berfungsinya partikularitas atau keterbatasan kekuasaan (kompetensi, sumber daya, kemampuan individu serta organisasi) demi kepentingan atau kebaikan bersama.

Sebuah studi menjelaskan arti pentingnya integritas dalam diri individu yang berdampak pada kemajuan organisasi yang dipimpinnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cecchetti (2018) menunjukkan bahwa integritas menjadi komponen penting dalam memajukan badan usaha milik negara (BUMN). Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara beberapa dewan direksi yang berkomitmen untuk memerangi korupsi. Dalam memerangi korupsi serta keinginan untuk memajukan BUMN, hal mendasar yang dibutuhkan yaitu integritas personal dewan direksi. Perdebatan yang terjadi dalam lingkup dewan direksi berkontribusi pada penerapan transparansi serta menjaga integritas di BUMN. Selain itu integritas merupakan karakter yang universal, yang harus dimiliki oleh siapa pun dan dalam profesi apa pun. Contoh lain yang menyebutkan pentingnya integritas dalam diri individu yaitu dalam penelitian (Pratama, Pardjono, & Sofyan, 2019) yang menyebutkan bahwa integritas merupakan salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang pelaut dalam industri perkapalan. Dia menjelaskan bahwa karakter integritas penting untuk dimiliki oleh seorang pelaut karena akan membawa dirinya untuk selalu berusaha melakukan hal yang benar, mewujudkan apa yang pernah dikatakan atau dijanjikan, hidup berdasarkan etika, mau belajar dari masalah dan kegagalan. Dengan demikian, integritas merupakan karakter universal yang harus dimiliki oleh setiap personal.

Dengan demikian ekspresi integritas dalam diri individu siswa tercermin pada ciri-ciri pribadi berikut. Pertama, memiliki fisik yang sehat dan bugar, maksudnya memiliki kemampuan hidup sosial yang semakin baik, kekayaan rohani yang semakin mendalam, dan mental yang kuat dan sehat. Kedua, kadar konflik dalam dirinya rendah, maksudnya dia tidak sedang berperang melawan dirinya sendiri (pribadinya menyatu) dan memiliki lebih banyak energi untuk tujuan produktif. Ketiga, memiliki kemampuan dalam menata batin sampai pada tahap kebebasan batin sehingga tidak mudah diombang-ambing oleh gejolak emosi dan perasaan diri. Keempat, memiliki kedekatan hidup pada Tuhan sehingga mampu menanggung risiko dan konsekuensi dari pilihan hidupnya yang religius. Kelima, seorang yang tidak mengalami banyak keraguan, dalam arti tidak bingung terhadap mana yang benar atau salah, dan baik atau buruk. Keenam, memiliki kemampuan hidup secara jernih, melihat hidup dengan apa adanya, dan bukan karena hanya keinginannya. Dalam kasus ini bagaimana seseorang tidak lagi bersikap emosional, melainkan lebih objektif terhadap pengamatannya. Ketujuh, dapat membaktikan tugas, kewajiban atau panggilan tertentu yang dipandang sebagai sesuatu penting.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan dalam penelitian tentang implementasi pendidikan antikorupsi: upaya pembentukan warga negara muda berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut: (1) Implementasi pendidikan antikorupsi secara kurikuler yaitu diberikan melalui mata pelajaran PPKn yang bersifat terintegrasi pada kompetensi dasar (KD). Selain itu penanaman nilai-nilai antikorupsi yang dilakukan melalui pembiasaan-pembiasaan dalam kegiatan pembelajaran siswa di kelas seperti siswa untuk tidak mencontek, siswa tidak bergantung kepada teman dalam mengerjakan tugas, siswa untuk tidak terlambat masuk kelas, siswa untuk tidak lalai dalam menyelesaikan tugas, siswa untuk tidak menunda dalam menyelesaikan tugas, dan banyak kegiatan lain; (2) Implementasi pendidikan antikorupsi melalui kegiatan ekstrakurikuler yaitu membiasakan siswa untuk mengamalkan nilai-nilai antikorupsi pada setiap aktivitasnya. Seperti pemberian tanggung jawab sebagai panitia pelaksana atau penanggung jawab program kerja kegiatan ekstrakurikuler. Sehingga siswa pelaksana atau penanggung jawab tersebut harus bertanggung jawab dalam menjalankan program kerja serta

mengolah dana sebaik mungkin yang akhirnya untuk penyusunan laporan pertanggung jawaban (LPJ); dan (3) Siswa sebagai warga negara muda berintegritas khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam penelitian ini ditunjukkan melalui beberapa karakteristik yang dibuktikan dengan perolehan nilai rata-rata dari integritas siswa sebesar 46,93 atau berada pada interval $X \geq 45$ yang berarti bahwa tingkat integritas siswa di DIY tergolong sangat baik.

Dari penelitian ini, pendekatan aksiologis dalam penguatan nilai-nilai antikorupsi memiliki kontribusi signifikan terhadap pencapaian tingkat integritas yang tinggi di kalangan siswa. Hal ini sangat penting dalam konteks pendidikan antikorupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di mana generasi penerus bangsa perlu dibekali dengan pemahaman yang kuat tentang integritas untuk mencegah tindakan korupsi di masa depan. Ke depan, model pendidikan antikorupsi ini tidak hanya dapat diterapkan di DIY, tetapi diharapkan juga di daerah lain dengan penyesuaian konteks lokal masing-masing. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi, penting bagi kebijakan pendidikan untuk mengintegrasikan pendidikan antikorupsi secara sistemik dalam kurikulum nasional dan regional. Rekomendasi untuk penelitian lanjutan meliputi studi tentang dampak jangka panjang dari pendidikan antikorupsi terhadap perilaku etis siswa serta pengembangan program pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengajarkan nilai-nilai antikorupsi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pendidikan antikorupsi dapat memberikan nilai tambah yang berkelanjutan dan membentuk generasi yang lebih integritas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan penelitian bersama dengan berbagai peneliti dari Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Negeri Yogyakarta. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada para Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Yogyakarta, SMA Negeri 1 Sleman, dan SMA Negeri 2 Bantul yang mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di sekolah yang dipimpin. Dan kepada para Guru dan Siswa di masing-masing sekolah yang berkenan sebagai objek penelitian.

DAFTAR RUJUKAN

- Abi, A. R. (2017). PARADIGMA MEMBANGUN GENERASI EMAS INDONESIA TAHUN 2045. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Volume? Issue? <https://doi.org/10.17977/um019v2i22017p085>
- Anas, dkk. (2018). Inseri pendidikan antikorupsi melalui mata pelajaran PPKn untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Direktorat Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat Kedeputan Bidang Pencegahan KPK.
- Asril, Z. (2010). *Micro teaching: Disertai dengan pedoman pengalaman lapangan*. Rajawali Pers.
- Audretsch, F. C. D. B. (2018). Corruption, Entrepreneurship, and Social Welfare A Global Perspective. In Springer. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-319-64916-0_1
- Badan Pusat Statistik. (2010). Jumlah dan distribusi penduduk. Badan Pusat Statistik.
- Basabose, J. de D. (2019). Anti-corruption aEducation and Peacebuilding. In *Anti-corruption Education and Peacebuilding*. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-03365-1>
- Biesta, G., Lawy, R., & Kelly, N. (2009). Understanding young people's citizenship learning in everyday life: The role of contexts, relationships and dispositions. *Education, Citizenship and Social Justice*. <https://doi.org/10.1177/1746197908099374>
- BSNP. (2006). Standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah: Standar kompetensi dan kompetensi dasar SMA/MA. Badan Standar Nasional Pendidikan.
- Cecchetti, I. (2018). The role of boards of directors in transparency and integrity in state-owned enterprises. In *Studies in Public and Non-Profit Governance*. <https://doi.org/10.1108/S2051-66302018000007001>
- Endro, G. (2017). *Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya*. Integritas.
- Gea, A. A. (2014). Integritas Personal dan Kepemimpinan Etis. *Humaniora*. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i2.3197>
- Gephart, M. (2016). Local embedding of international discourse: Chile and the international and transnational anti-corruption campaign. *International Relations*. <https://doi.org/10.1177/0047117815585889>
- Gong, T., & Wang, S. (2013). Indicators and Implications of Zero Tolerance of Corruption: The Case of Hong Kong. *Social Indicators Research*. <https://doi.org/10.1007/s11205-012-0071-3>
- Gostick, A., & Telford, D. (2003). *The Integrity Advantage* (3rd editio). Gibbs M. Smith Inc.

- Hakeem Ishola, M. (2012). Fighting corruption: An expectation augmented approach. *Humanomics*. <https://doi.org/10.1108/08288661211228898>
- Handoyo, E. (2009). Pendidikan antikorupsi. Widya Karya.
- Harmanto, H. (2014). Pendidikan Antikorupsi melalui Budaya Sekolah Berbasis Nilai-nilai Keislaman. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*. <https://doi.org/10.15642/islamica.2012.7.1.100-122>
- Kissling, M. T. (2018). Social studies and beyond: attending to informal citizenship education in schools. *Social Studies Research and Practice*. <https://doi.org/10.1108/ssrp-06-2017-0033>
- Komalasari, K., & Saripudin, D. (2018). The influence of living values education-based civic education textbook on student's character formation. *International Journal of Instruction*. <https://doi.org/10.12973/iji.2018.11127a>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). Laporan tahunan 2017: Demi Indonesia untuk Indonesia.
- Manurung, R. T. (2012). Pendidikan Antikorupsi sebagai satuan pembelajaran berkarakter dan humanistik. *Jurnal Sosioteknologi*, 11(27), 233–244.
- McMurray, A., & Niens, U. (2012). Building bridging social capital in a divided society: The role of participatory citizenship education. *Education, Citizenship and Social Justice*. <https://doi.org/10.1177/1746197912440859>
- Miller, S. (2016). Corruption and Anti-Corruption in Policing-Philosophical and Ethical Issues. Springer Nature. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-46991-1>
- Mintrop, H. (2012). Bridging accountability obligations, professional values and (perceived) student needs with integrity. *Journal of Educational Administration*. <https://doi.org/10.1108/09578231211249871>
- Murdiono, M. (2016). Pendidikan Anti Korupsi Terintegrasi dalam Pembelajaran PKn untuk Menanamkan Karakter Kejujuran di SMP. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.21831/socia.v13i1.9910>
- Noor, M. (2016). Kebijakan pembangunan kependudukan dan bonus demografi. Serat Acitya.
- Nucci, L., Narvaez, D., & Krettenauer, T. (2014). Handbook of moral and character education. In *Handbook of Moral and Character Education*. <https://doi.org/10.4324/9780203114896>
- Nuriani Laura Malau Gurning, Haris Mudjiman, & Samsi Haryanto. (2014). Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Warung Kejujuran Di Smp Keluarga Kudus. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran*.
- Peterson, A. (2011). Civic republicanism and civic education: The education of citizens. In *Civic Republicanism and Civic Education: The Education of Citizens*. <https://doi.org/10.1057/9780230306752>
- Pratama, W., Pardjono, P., & Sofyan, H. (2019). The seafarers' characters standard for international shipping industry. In *Character Education for 21st Century Global Citizens*. <https://doi.org/10.1201/9781315104188-7>
- Quah, J. S. T. (2017). Five success stories in combating corruption: lessons for policy makers. *Asian Education and Development Studies*. <https://doi.org/10.1108/AEDS-03-2017-0031>
- Republik Indonesia. (2003). Undang-undang Republik Indonesai Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Rosyada, D. (2013). Paradigma Pendidikan Demokratis, Sebuah Model pelibatan Masyarakat dalam Pendidikan. Prenada Media.
- Šamánková, D., Preiss, M., & Přihodová, T. (2018). The Contextual Character of Moral Integrity. In *The Contextual Character of Moral Integrity*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-89536-9>
- Schulz, W., Ainley, J., Fraillon, J., Kerr, D., & Losito, B. (2010). ICCS 2009 International Report: Civic Knowledge, Attitudes, and Engagement among Lower-Secondary School Students in 38 Countries. In *ICCS Intn Report*.
- Sukadari, U., Mahilda Dea Komalasari, U., & Ahmad Maburri Wihaskoro, S. (2018). Efektivitas Penanaman Nilai Integritas pada Siswa SD melalui Buku Wayang Pandawa Bervisi Antikorupsi. *Integritas Jurnal Antikorupsi*.
- Tamba, M. A. (2017). Pendidikan antikorupsi melalui pendidikan kewarganegaraan. *Prosiding Seminar Nasional Tahunan FIS Unimed*, 513–519.
- Transparency International. (2004). Teaching integrity to youth: Examples from 11 countries.
- Winataputra, U. S. (2012). Pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif internasional. Widya Aksara Press.
- Wong, K. L., Lee, C. K. J., Chan, K. S. J., & Kennedy, K. J. (2017). Constructions of civic education: Hong Kong teachers' perceptions of moral, civic and national education*. *Compare*. <https://doi.org/10.1080/03057925.2016.1262756>